

# 2020




PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS PERTANIAN

## PROPOSAL

BANTUAN KEUANGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan :  
**Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian**

 Alamat :  
Komplek Perkantoran Cimaja  
Jl. Raya Cisolok KM. 10 - Palabuhanratu

  Telp & e-mail :  
Telp. (0266) 436407, 436408  
[dinaspertanian\\_kab.sukabumi@yahoo.co.id](mailto:dinaspertanian_kab.sukabumi@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan usulan fasilitasi pembiayaan kegiatan “Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian” dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Sukabumi ini dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan didalamnya.

Kami sangat berharap proposal ini dapat berguna walaupun kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam proposal ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan proposal yang akan kami susun di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga proposal yang telah kami susun ini dapat berguna dan memberikan gambaran mengenai kebutuhan dukungan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi. Demikian proposal ini kami susun untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Sukabumi,       Maret 2019

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Sukabumi,



**Ir. H. SUDRAJAT, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620422 198803 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Sasaran .....	4
1.4. Keluaran .....	4
 <b>BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH, PENYULUH PERTANIAN DAN SDM PETANI/KELEMBAGAAN</b>	
2.1. Keadaan Wilayah .....	6
2.2. Keadaan Penyuluh Pertanian .....	9
2.3. Keadaan SDM Petani/Kelembagaan .....	9
 <b>BAB III. OPTIMALISASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DAN KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL</b>	
3.1. Optimaliosasi Kinerja Penyuluh Pertanian .....	11
3.2. Kebutuhan Biaya ....	12
 <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian (Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan) dalam tatanan pembangunan ekonomi Kabupaten Sukabumi memiliki dimensi yang sangat strategis. Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang paling dominan. Usahatani yang diusahakan oleh para petani nelayan di Kabupaten Sukabumi mayoritas berusahatani di bidang tanaman pangan.

Apabila pembangunan sektor tersebut pengelolaanya telah benar-benar terintegrasi dengan *sektor hulu* dan *sektor hilir* (agribisnis) yang ramah lingkungan secara utuh, akan memiliki *efek multifier* yang lebih besar lagi dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Sukabumi, yang pada gilirannya akan menopang terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Sampai saat ini, implementasi pembangunan sektor pertanian melalui pendekatan agribisnis di Kabupaten Sukabumi, masih diharapkan atas kenyataan bahwa sektor pertanian didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh ratusan ribu petani yang bergabung dalam kelompok tani atau yang belum bergabung dalam kelompok tani yang berpendidikan rendah, berlahan dan bermodal kecil serta produktivitas rendah. Fenomena ini menyebabkan mereka kurang mampu mengakses berbagai sumberdaya agribisnis, tanpa difasilitasi pemerintah. Oleh karena itu, apabila komitmen untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai *core bisnis* pembangunan perekonomian telah diambil maka konsekuensinya pemerintah harus mampu memfasilitasi petani agar secara mandiri dapat merancang bangun, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi usahanya dalam konfigurasi sistem dan usaha agribisnis.

Seiring dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, upaya untuk memfasilitasi terwujudnya kemandirian

petani merupakan tugas pokok dari para penyuluh yang salah satunya penyuluh pertanian PNS. Dalam konteks mewujudkan kemandirian inilah, para penyuluh pertanian harus mampu memfasilitai, memandu, membimbing serta mendampingi para petani agar mereka memiliki kemampuan tidak lagi nerfokus pada kegiatan usaha (*on farm*), melainkan juga harus mampu mengembangkan usahanya secara terintegrasi dengan *off farm hulu* dan *off farm hilir*.

Dalam upaya akselerasi pemberdayaan petani khususnya untuk membangun dan mewujudkan kemandirian para petani dalam mengembangkan usahatani secara *integratedi dengan off farm hulu* dan *off farm hilir* ditinjau dari jumlah penyuluh pertanian, pada saat ini dihadapkan dengan semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian, karena ada sebagian yang telah memasuki purna bakti, alih jabatan dan sebagainya, walaupun sudah dibantu dengan adanya penyuluh CPNS tetapi belum memadai karena harus membina kelembagaan tani di 381 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Sukabumi. . Oleh karena itu, upaya yang akan ditempuh Kabupaten Sukabumi khususnya dalam akselerasi pemberdayaan petani, akan lebih fokus pada peningkatan optimalisasi kinerja penyuluh pertanian yang ada.

Peningkatan optimalisasi kinerja Penyuluh Pertanian dalam implementasinya, akan dilaksanakan dalam upaya untuk mengoptimalkan tercapainya indikator pokok standar kinerja penyuluh pertanian, yaitu : (1) tersusunnya programa penyuluh pertanian; (2) tersusunnya rencana kerja tahunan penyuluh; (3) tersusun dan tersedianya data dan peta wilayah; (4) tersedianya informasi teknologi pertanian; (5) tumbuh kembangnya kemitraan usaha antara pelaku utama dengan pelaku usaha; (7) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi; (8) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja; dan (9) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utaman di wilayahnya.

Guna akselerasi pencapaian 9 indikator tersebut, utamanya dalam akselerasi peningkatan produktivitas produksi, mutu dan daya saing produk pertanian sejalan dengan tuntutan pasar, tentunya menuntut dukungan penyuluhan yang *dinamis, kreatif dan inovatif*. Dalam kaitan dengan inilah maka selain peningkatan dan pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian, juga masalah dukungan fasilitas dan biaya operasional penyuluh merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian.

Fasilitasi biaya operasional penyuluh (BOP) sampai saat ini masih mengandalkan anggaran dari tingkat pusat sebesar Rp. 320.000/bulan dan (belum dipotong pajak sebesar 15%). Dana tersebut, apabila dibandingkan dengan jumlah petani metodologi pembelajaran yang perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi existing petani, dirasakan sangat terbatas sekali. Oleh karena itu, dukungan biaya operasional dari tingkat Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai Penunjang Penyuluhan Pertanian, akan dapat menjadi solusi bagi peningkatan kinerja penyuluh pertanian.

## **1.2. Tujuan**

- 1) Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.
- 2) Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan untuk mendukung tercapainya akselerasi peningkatan produktivitas/produksi pertanian dan pendapatan petani.
- 3) Meningkatkan keberadaan lembaga petani (Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi Tani) dalam mewadahi aktivitas usaha petani, mulai dari *off farm hulu, on farm* dan *off farm hilir*.

- 4) Mengembangkan sistem penyuluh pertanian yang dinamis dalam mewujudkan masyarakat tani Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

### **1.3. Sasaran**

Meningkatnya motivasi dan dinamika penyuluh pertanian walaupun dengan jangkauan binaan yang jauh dan jalan yang relatif kurang baik dalam melaksanakan proses pemberdayaan kelembagaan petani/kelompoktani, Gabungan Kelompoktani (Gapoktan), Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) dan Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2018, yaitu dalam mengelola proses produksi (budidaya) komoditi tanaman pangan pokok (padi, jagung, kedele, kacang tanah), komoditi hortikultura unggulan (sayuran, buah-buahan, tanaman hias), komoditi peternakan, komoditi perkebunan dan kehutanan melalui sistem penyuluhan pertanian secara terarah dan berencana.

Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi, mencanangkan target pencapaian luas areal tanam dilahan kering untuk tanaman padi gogo seluas 200 Ha, kedelai 400 Ha dan Tanaman Jagung 5000 Ha. Dengan adanya hal ini kinerja penyuluh harus lebih ekstra lagi dalam pemanfaatan lahan kering yang bekerjasama dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

### **1.4. Keluaran**

Keluaran yang diharapkan dengan adanya fasilitasi BOP penyuluh pertanian dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 bagi penyuluh pertanian sebagai Penunjang Penyuluhan Pertanian diharapkan dapat :

- 1) Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.
- 2) Meningkatnya tingkat keberdayaan petani dalam mengadopsi teknologi maju anjuran lokal spesifik.
- 3) Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan (khususnya padi, jagung, kedele, kacang tanah, dan komoditi hortikultura unggulan).
- 4) Tumbuh kembangnya lembaga petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), sebagai wadah proses belajar dan kerjasama usaha petani dalam mengembangkan agribisnis berbagai komoditi unggulan, guna meningkatkan daya saing, nilai tambah dan pendapatan petani.



## II. GAMBARAN UMUM WILAYAH, PENYULUH PERTANIAN DAN SDM PETANI / KELEMBAGAAN

### 2.1. Keadaan Wilayah Di Kabupaten Sukabumi

Luas Wilayah Kabupaten Sukabumi 409.402 ha, sebagian besar berupa lahan darat seluas 342,599 ha atau 83,50% sedangkan lahan sawah hanya 66,803 ha atau 16,50%. Luas lahan darat/kering sebagian besar berupa tegalan atau ladang yaitu sekitar 105.513 ha atau 30,23%. Data penggunaan lahan secara rinci disajikan pada table 1 berikut dibawah ini.

**Tabel 1. Data Ekosistem dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	Persentase
1.	Lahan sawah		
	a. Berpengairan teknis	5.582	83,55
	b. Berpengairan ½ teknis	5.101	76,35
	c. Berpengairan sederhana/PU	5.591	83,69
	d. Berpengairan pedesaan	15.553	23,28
	e. Berpengairan tadah hujan	10.959	16,40
	f. Berpengairan lainnya	24.017	35,95
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.803</b>	<b>100</b>
2.	Lahan kering		
	a. Pekarangan	18.440	53,82
	b. Tegalan/ladang	105.413	30,76
	c. Penggembalaan	4.235	12,36
	d. Sementara tidak diusahakan	5.180	15,11

<b>3</b>	<b>e. Hutan rakyat</b>	<b>46.239</b>	<b>13,49</b>
	<b>f. Hutan negara</b>	<b>83.710</b>	<b>24,43</b>
	<b>g. Perkebunan</b>	<b>72.490</b>	<b>21,15</b>
	<b>h. Lain-lain</b>	<b>5.025</b>	<b>14,66</b>
	<b>Lahan lainnya</b>		
	<b>- Tambak</b>	<b>200</b>	<b>0,05</b>
	<b>- Kolam/Empang</b>	<b>1.667</b>	<b>0,48</b>
<b>J u m l a h</b>		<b>342.599</b>	<b>100</b>

**Sumber : Sukabumi dalam angka, 2018**

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya bergelombang di daerah bagian selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah. Adanya daerah pantai dan gunung-gunung antara lain Gunung salak dan Gunung Gede di bagian utara dan tengah yang masing-masing mempunyai puncak ketinggian 2.211 m dan 2.958 m, menyebabkan keadaan lereng yang sangat miring (lebih besar dari 35 °) meliputi 29% dari luas Kabupaten Sukabumi. Kemiringan antara 13 – 35 ° meliputi 37 persen dan kemiringan 2 – 13 ° meliputi 21 persen, sisanya daerah datar meliputi 13 persen dari luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sukabumi tahun 2018, tercatat bahwa rumah tangga pertanian (RTP) mencapai 274.769 rumah Tangga (RT) atau mencapai kurang lebih 45,73 % dari total rumah tangga (RT) sebanyak 600.852 Rumah Tangga (BPS 2013). Keadaan umum sosial ekonomi rumah tangga pertanian tersebut secara rinci digambarkan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Keadaan Umum Sosial Ekonomi Petani Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	Jumlah rumah Tangga (RT)	Persentase (%)	Keterangan
1	Keadaan Rumah Tanga Pengguna lahan sawah  a) Pemilik b) Pemilik Penggarap c) Penggarap d) Buruh Tani	 27.477 91.589 88.814 67.318	 10,00 34,00 30,01 24,99	
2	Keadaan Rumah Tanga Pengguna lahan kering  a. Pemilik b. Pemilik Penggarap c. Penggarap d. Buruh tani	 35.046 94.284 70.039 70.012	 13,01 35,00 26,00 25,99	
3	Penguasaan lahan pertanian  a. Lahan Sawah (Ha) • <0,10 Ha • 0,10 – 0,49 Ha • 0,50 – 0,99 Ha • 1,00 – 1,99 Ha • 2,00 = 2,99 Ha • ≥ 3,00 Ha	 121.130 95.496 27.058 12.212 11.216 2.270	 44.97 35.45 10.04 4.53 4.16 0,84	
4	Penguasaan lahan pertanian  b. Lahan Kering (Ha) • <0,10 Ha • 0,10 – 0,49 Ha • 0,50 – 0,99 Ha • 1,00 – 1,99 Ha • 2,00 = 2,99 Ha • ≥ 3,00 Ha	 88.761 93.018 6.151 21.766 15.193 14.493	 32.95 34.53 13.42 8.08 5.64 5.38	

**Sumber : Sukabumi dalam angka, 2018**

Pada tabel di atas tampak bahwa keadaan umum sosial ekonomi petani kabupaten Sukabumi relatif sangat bervariasi. Fenomena tersebut, tentunya akan menimbulkan terjadinya keragaman karakteristik dan orientasi dan pola perilaku kesehariannya, termasuk tingkat kebutuhan, pola komunikasi, orientasi usaha daya serap informasi, permasalahan yang dihadapi dan sebagainya, yang pada gilirannya juga akan menuntut adanya spesifikasi pembinaan dan bimbingan maupun pendampingan dari para

penyuluh pertanian sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani yang ada di setiap wilayah binaannya.

## **2.2. Keadaan Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Sukabumi**

Penyuluh pertanian di Kabupaten Sukabumi sebanyak 233 orang, terdiri dari 99 penyuluh PNS, 74 orang penyuluh pusat /THL-TBPP pusat dan 60 orang penyuluh propinsi/ TB-THL propinsi, yang tersebar di 47 kecamatan di 381 desa dan 5 kelurahan dengan keberadaan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kabupaten 5 orang
- b. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kec./BP3K 47 orang
- c. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat lapangan/desa 181 orang.

Dengan jumlah penyuluh diatas maka rasio antara penyuluh pertanian dengan rumah tangga pertanian (petani) adalah 1:1593. Rasio ini tentunya akan sangat berat dalam pelaksanaan operasional penyuluhan, apalagi usia sebagian penyuluh pertanian sebagian diantaranya sudah di atas 50 tahun bahkan sudah ada yang masuk purna bakti dan baru 69 orang yang mendapat BOP dari pemerintah pusat/propinsi. Kondisi ideal rasio penyuluh pertanian dengan petani adalah 1:400-480. Dilihat dari kualitas penyuluh, bagi penyuluh senior kemampuan menguasai metode penyuluhan cukup kompeten, tetapi penguasaan dalam informasi teknologi sangat terbatas.

## **2.3. Keadaan SDM Petani / Kelembagaan Di Kabupaten Sukabumi**

Kelembagaan petani/kelompok tani/Gabungan kelompok tani (gapoktan) / dan lembaga tani lainnya yang perlu dibina untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilannya adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok tani : 3.140 (156.785 orang anggota kelompok tani) terdiri dari :

- Kelompok Pemula	:	921	kelompok
- Kelompok Lanjut	:	1.782	kelompok
- Kelompok Madya	:	412	kelompok
- <u>Kelompok Utama</u>	:	<u>25</u>	<u>kelompok</u>
Jumlah	:	3.140	kelompok

- b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) : 350 kelompok (2.817 orang anggota )
- c. Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) : 152 unit
- d. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) : 19 unit
- e. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) : 26 unit

Sehubungan dengan rasio antara penyuluh dengan petani, paling sedikit ada 2 (dua) upaya yang dapat ditempuh, yaitu : (1) Rekrutmen penyuluh pertanian baru dan (2) Peningkatan optimalisasi kinerja penyuluh pertanian yang ada. Namun demikian langkah rekrutmen ini pada dasarnya merupakan upaya yang cukup memerlukan anggaran biaya yang tidak kecil dan apabila tidak disertai dengan upaya peningkatan dukungan fasilitas, sarana/prasarana dan anggaran operasional serta pengembangan kemampuan profesionalnya, upaya tersebut tidak akan banyak berarti. Oleh karena itu dalam jangka pendek terutama dalam akselerasi pemberdayaan petani hendaknya upaya tersebut lebih difokuskan pada upaya optimalisasi kinerja penyuluh pertanian yang sudah ada, yang dalam operasionalnya didukung dengan biaya operasional yang memadai.

### **III. OPTIMALISASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DAN KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL**

#### **3.1. Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian**

Dalam rangka akselerasi pemberdayaan petani, ada 3 (tiga) upaya Peningkatan Optimalisasi Kinerja yang akan dilaksanakan : (1) Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat lapangan, (2) Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat BPP/Kecamatan dan (3) Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kabupaten. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian di tingkat lapangan, selain akan diarahkan pada pemantapan tugas pokok sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor : Per/02/Menpar/2/2008 tentang jabatan fungsional Penyuluh pertanian dan Angka Kreditnya juga difokuskan untuk memotivasi, mendorong dan menggerakkan agar para penyuluh pertanian mampu meningkatkan frekuensi dan intensitas kerjanya terutama dalam penyuluhan pertanian lapangan harus mampu melaksanakan kunjungan ke kelompoktani selama 16 hari kerja (1 hari 2 kelompok). Sisanya sebanyak 8 hari kerja digunakan untuk mengikuti pelatihan dan atau pertemuan di BPP, penyelesaian administrasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
- b. Bagi penyuluh pertanian tingkat BPP/kecamatan, peningkatan optimalisasi selain diarahkan pada pemantapan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagaimana di atas, juga akan difokuskan agar mereka mampu memfasilitasi berbagai penyelenggaraan pelatihan maupun pertemuan-pertemuan di BPP serta mampu melaksanakan bimbingan/supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh pertanian tingkat lapangan.
- c. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kabupaten, Optimalisasi kinerjanya lebih difokuskan agar mereka mampu menjadi perancang berbagai materi maupun metode penyuluhan, melatih para penyuluh serta melakukan bimbingan/supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh pertanian yang ada di tingkat BPP/kecamatan dan lapangan.

### 3.2. Kebutuhan biaya

Untuk meningkatkan optimalisasi kinerja penyuluh pertanian dibutuhkan dukungan biaya operasional sebesar Rp. 500.000,-/bulan/penyuluh. Besarnya kebutuhan biaya ini mengacu pada biaya yang diperlukan penyuluh pertanian dalam rangka memfasilitasi pembelajaran para petani/kelompok tani sebanyak 10 hari kerja/bulan  $\pm$  Rp. 50.000,-/ hari kerja dan itu Rp. 500.000 ,-/ bulan. Secara keseluruhan biaya operasional yang diperlukan untuk penyuluh pertanian 233 orang sebesar Rp 1.398.000.000,- ( Satu Milyar Tiga ratus Sembilan Puluh Delapan juta Rupiah ).

Dengan demikian untuk mendukung upaya optimalisasi kinerja penyuluh pertanian, di Kabupaten Sukabumi untuk 233 orang penyuluh pertanian pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini dan dalam lampiran 1.

Tabel 3. Kebutuhan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	Jumlah Penyuluh (Orang)	Kebutuhan Biaya Operasional (Rp/bulan/orang)	Jumlah kebutuhan Biaya Operasional dalam satu tahun (12 bulan) (Rp)
1	Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten	5	500.000,-	30.000.000,-
2	Penyuluh Pertanian Tingkat BP3K/Kecamatan	47	500.000,-	282.000.000,-
3	Penyuluh Pertanian tingkat Lapangan/Desa	181	500.000,-	1.086.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>233</b>		<b>1.398.000.000,-</b>

Besarnya biaya operasional yang dibutuhkan tersebut diatas diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

#### a. Penyuluh pertanian yang bertugas di kabupaten

- (1) Pembuatan bahan sosialisasi kebijakan/prioritas program dan kegiatan 2020.
- (2) Biaya koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait dan sumber teknologi.
- (3) Pembuatan materi bahan pembinaan/bimbingan bagi penyuluh pertanian BP3K/kecamatan dan penyuluh lapangan.
- (4) Biaya pembuatan bahan pelatihan penyuluh di BPP.

- (5) Biaya pembinaan/supervisi/monitoring dan evaluasi lapangan serta pertemuan teknis di tingkat provinsi.
- (6) Biayan untuk berbagai kajian dan analisis untuk pengembangan penyuluh pertanian.

**b. Penyuluh pertanian yang bertugas di kecamatan**

- (1) Pembuatan bahan sosialisasi kebijakan/prioritas program dan kegiatan 2020 di tingkat BPP.
- (2) Biaya koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait di tingkat kecamatan
- (3) Pembuatan materi bahan pembinaan/bimbingan bagi penyuluh pertanian lapangan yang ada di wilayah binaannya.
- (4) Biaya fasilitasi penyelenggaraan pelatihan penyuluh dan pertemuan-pertemuan di BPP.
- (5) Biaya pembinaan/supervisi/monitoring dan evaluasi lapangan serta rapat di tingkat kabupaten.
- (6) Biayan untuk berbagai kajian dan analisis untuk pengembangan penyuluh pertanian.

**c. Penyuluh pertanian yang bertugas di lapangan**

- (1) Biaya penyiapan materi penyuluhan/pemanduan Sekolah Lapang (SL).
- (2) Biaya untuk pembuatan alat peraga penyuluhan.
- (3) Transport/bahan bakar midan byak (BBM) kunjungan ke kelompok tani dan mengikuti pelatihan di BPP dan pembinaan/supervisi/monitoring dan evaluasi kegiatan lapangan
- (4) Biaya fasilitasi penyelenggaraan demonstrasi plot/kotak pengalaman dan media penyuluhan lainnya yang sejenis.



#### IV. PENUTUP

Sesuai dengan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, akselerasi pemberdayaan petani di Kabupaten sukabumi akan dilaksanakan melalui peningkatan optimalisasi kinerja penyuluh pertanian mulai dari tingkat lapangan sampai tingkat kabupaten. Upaya optimalisasi ini memerlukan dukungan pembiayaan penyuluh pertanian untuk 233 orang sebesar = **Rp. 1.398.500.000, (Satu Milyar Tiga ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima ratus ribu rupiah)** Mengingat keterbatasan APBD kabupaten, untuk itu dimohon biaya operasional bagi penyuluh pertanian tersebut dapat kiranya dipenuhi dari tingkat Provinsi melalui bantuan keuangan Bapak Gubernur Jawa Barat.

Demikian permohonan tambahan atau bantuan biaya bagi 233 orang penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020, atas dikabulkannya permohonan ini kami haturkan terima kasih.

Sukabumi,                      Maret 2019  
Kepala Dinas



**Ir. H. SUDRAJAT, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620422 198803 1 006